

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI REALISASI PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DI PROVINSI BALI

Komang Sri Ayu Puspita Dewi¹
Luh Gede Meydianawathi²

^{1,2}Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: puspithadewi94@gmail.com/ telp: +62 81339195955

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara serempak dan parsial jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, tingkat suku bunga, PDRB dan kebijakan otonomi daerah terhadap realisasi PMDN di Provinsi Bali. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode observasi on-partisipan, yaitu dengan mencari data dari Badan Pusat Statistik, Badan Penanaman Modal dan instansi terkait lainnya. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, yang disertai dengan uji asumsi klasik. Hasil uji dengan memperoleh hasil secara simultan variabel jumlah kunjungan wisatawan, tingkat suku bunga, PDRB dan kebijakan otonomi daerah berpengaruh signifikan terhadap realisasi PMDN di Provinsi Bali. Secara parsial jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, tingkat PDRB dan kebijakan otonomi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi PMDN di Provinsi Bali. Sementara itu, secara parsial tingkat suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap realisasi PMDN di Provinsi Bali.

Kata Kunci: wisatawan mancanegara, suku bunga, PDRB, kebijakan otonomi daerah, PMDN

ABSTRACT

This study aimed to determine the effect of simultaneous and partial number of tourist arrivals, the interest rate, the GDP and the regional autonomy policy towards domestic investment in the province of Bali. The data used in this research is secondary data. Data collected methods used in this study is on-participant observation method by collecting data from the Central Bureau of Statistics, Board of Investment and other relevant agencies. The analysis technique used in this research is multiple linear regression analysis, which is accompanied with the classical assumption. The result show that obtaining simultaneous variable number of tourist visits, the interest rate, GDP and regional autonomy significant effect on domestic investment in the province of Bali. Partially number of tourists visit mancanegra, the level of the GDP and the regional autonomy policy positive and significant impact on domestic realitation in Bali Province. Meanwhile, the partial interest rate a significant negative effect on domestic realitation in Bali Province.

Keywords: foreign tourists, interest rates, GDP, regional autonomy policy, domestic investment

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang terencana menuju keadaan masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik daripada kondisi yang lalu (Tanuwidjaya, 2013). Sejak tahun 1969 Pemprov Bali bersama masyarakat telah melaksanakan pembangunan ekonomi disegala bidang. Pemerintah telah menghabiskan banyak anggaran dalam proses pembangunan. Dalam upaya pembangunan jangka panjang pemerintah memerlukan modal yang besar dalam mempercepat pembangunan nasional di segala bidang. Tetapi, kemampuan pemerintah dalam menyediakan modal untuk keperluan mempercepat pembangunan terbatas. Oleh karena itu sebagai salah satu aspek dalam kebijakan pemerintah perlu melakukan usaha-usaha agar memperoleh lebih banyak dana untuk pembangunan (Amirudin, 2003:1).

Provinsi Bali sebagai sentra perkembangan pariwisata merupakan tujuan dari kegiatan investasi, baik yang dilakukan oleh investor asing maupun yang dilakukan investor dalam negeri (Nizar dkk., 2013). Perkembangan perekonomian global Provinsi Bali memerlukan investasi baru untuk mengurangi tingkat pengangguran yang setelah krisis ekonomi melanda negeri ini yang semakin parah. Semakin tinggi tingkat pengangguran maka tingkat kemiskinanpun semakin tinggi, hal ini mengakibatkan pendapatan masyarakat semakin rendah dan akhirnya mengurangi pendapatan nasional (Lubis, 2008:2). Kegiatan investasi mampu memberikan kontribusi yang besar dalam mendorong kinerja laju pertumbuhan ekonomi Bali, mendorong timbulnya industri pasokan bahan baku lokal, proses alih teknologi dan manajemen, serta manfaat bagi investor lokal.

Faktor-Faktor...[Komang Sri ayu Puspita Dewi, Luh Gede Meydianawathi]

Adapun beberapa faktor yang dapat menentukan minat para investor untuk berinvestasi di suatu daerah selain potensi sumber daya alam yang menarik ialah kondisi lingkungan sekitar seperti infrastruktur, pendidikan dan angka korupsi suatu daerah (Lindblad, 2015). Salah satu investasi yang diharapkan dalam percepatan pembangunan daerah oleh Pemprov Bali adalah Penanaman Modal Dalam Negeri (Sarwedi, 2002)

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebagai salah satu komponen aliran modal yang masuk ke suatu daerah dianggap sebagai aliran modal yang relatif stabil dan mempunyai resiko yang kecil dibandingkan dengan aliran modal lainnya, misalnya investasi portofolio maupun utang luar negeri. Penanaman modal dalam negeri mempunyai kelebihan diantaranya sifatnya permanen (jangka panjang), banyak memberikan andil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen dan membuka lapangan kerja baru. Hal ini diperlukan untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Disamping menggali sumber pembiayaan asli daerah, pemerintah daerah juga memerlukan sumber pembiayaan melalui investasi. Dilihat dari proporsi antara PMDN dan PMA di Provinsi Bali maka kontribusi yang PMDN yang lebih tinggi. PMDN mempunyai peran penting sebagai alternatif sumber dana dalam negeri yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Perbandingan proporsi PMDN dan PMA di Provinsi Bali dapat dilihat di Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Proporsi Realisasi PMDN dan PMA di Provinsi Bali

Investasi		Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2012
Invesatasi (Miliar Rupiah)	PMDN	50,84	2.651,00	7.314,00	7,594,04	7.793,11
Investasi (Miliar Rupiah)	PMA	2.096,11	4.210,16	4.385,96	4.478,77	3.634,97

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa terdapat perbandingan antara proporsi PMDN dan PMA di Provinsi Bali. Dilihat dari data tersebut pada tahun 2009-2010 tingkat PMA lebih besar dari pada PMDN. Tetapi pada tahun 2011-2013 justru berbanding terbalik dimana terjadi peningkatan yang cukup drastis pada proporsi realisasi PMDN, yaitu terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Guna menunjang perekonomian daerah yang lebih baik harusnya ada keseimbangan antara PMDN dengan PMA. Oleh karena itu pemerintah provinsi telah mengupayakan beberapa kebijakan seperti memneri jaminan keamanan, menjaga stabilitas politik, dan kepastian hokum. Selain itu pemerintah juga lebih mempermudah berijinan dan berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menetapkan regulasi yang mendorong kondisi investasi, sehingga investor akan semakin tertarik untuk menanamkan modal di Provinsi Bali. PMA lebih fluktuaktif dibandingkan dengan PMDN, dimana PMDN cenderung lebih stabil dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga pada penelitian ini PMDN yang dipilih.

Tingkat PMDN di Bali di topng oleh beberapa sektor. Adapun sektor tersebut adalah sektor pariwisata, sektor perdagangan, sektor industri pengolahan dan jasa. Tetapi, sebagian besar naik turunnya PMDN ditentukan oleh sektor pariwisata. Hal ini karena sektor kepariwisataan member kontribusi yang paling

dominan. Sektor pariwisata dapat memberikan pengaruh pada investasi melalui aktivitas ekonomi yang diciptakan pada industri pariwisata seperti pemenuhan kebutuhan wisatawan akan hotel, transportasi, restoran dan jasa lainnya yang dapat memberikan kontribusi terhadap investasi suatu wilayah. Selain itu industri pariwisata juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat suatu wilayah yang menjadi destinasi pariwisata.

Menurut Udayantini (2014), perkembangan sektor pariwisata di Provinsi Bali telah membuka mata investor untuk terlibat dalam penanaman modal di dalamnya. Dalam hubungan dengan sektor pariwisata, penanaman modal dalam negeri (*Domestic Direct Capital Investment*) pada dasarnya memiliki peran yang sangat vital. Hal ini tentunya terjadi mengingat selain mengadakan investasi para investor juga harus mengadakan pemasaran terkait dengan investasi yang sudah dilakukan.

Menurut Tendelilin (2010), perkembangan ekonomi sebagai akibat dari investasi akan memberikan efek positifnya terhadap sektor-sektor lainnya. Salah satunya adalah kenaikan nilai aset tidak bergerak yang memiliki kecenderungan untuk meningkat sesuai dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Kenaikan nilai aset ini menjadi alasan investor untuk berinvestasi dalam bentuk hotel maupun penginapan, sehingga meskipun secara ekonomi tingkat pengembalian modal sebagai akibat dari semakin jenuhnya investasi tergolong rendah akan tetapi investasi tetap dilakukan mengingat kenaikan nilai aset itu sendiri.

Tabel 2. Rencana Realisasi PMDN Provinsi Bali Periode 1995 – 2014

Tahun	Rencana (Miliar Rp.)	Realisasi (Miliar Rp.)	Tahun	Rencana (Miliar Rp.)	Realisasi (Miliar Rp.)
1995	405,936	280,557	2005	3.245,19	464,669
1996	392,964	651,787	2006	8.527,63	406,516
1997	813,471	302,979	2007	665,876	156,518
1998	785,705	170,978	2008	1.185,13	28,991
1999	1.267,26	75,151	2009	10.655,87	508,388
2000	141,865	34,387	2010	2.853,00	265,136
2001	749,407	604,147	2011	7.294,11	731,448
2002	27,522	6,075	2012	11.321,11	760,636
2003	706,146	491,408	2013	4.978,91	779,311
2004	819,874	661,364	2014	7.311.33	384,644

Sumber : Bali Dalam Angka, 2015

Berdasarkan Tabel 2 selama kurun waktu dari tahun 1995 hingga 2014 tercatat realisasi PMDN di Provinsi Bali mengalami fluktuasi. Selisih antara PMDN yang direncanakan dengan realisasinya, rata-rata jauh dari harapan, ini terbukti dari kecilnya nilai realisasi PMDN di Provinsi Bali Periode 1995 – 2014. Berfluktuasinya Realisasi PMDN itu diindikasikan terjadi karena situasi perekonomian yang tidak stabil. Data tahun 1995 menunjukkan realisasi terjadi hanya 3,666 Miliar Rupiah. Secara rata-rata penyerapan tertinggi antara rencana dan realisasi tertinggi dalam satu tahun tertinggi baru terjadi di tahun 2013. Era investasi di Provinsi Bali benar-benar sudah datang, akan tetapi kemudian memunculkan dilemma tersendiri bagi Provinsi sebagai bagian dari Negara Indonesia selaku negara berkembang. Perusahaan swasta maupun pemerintah sama-sama bisa proaktif memanfaatkan aliran dana guyuran investasi.

Salah satu indikator yang mempengaruhi PMDN di Provinsi Bali adalah kunjungan wisatawan. Jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi di Bali sebagai provinsi yang memiliki banyak obyek wisata, dan berada pada industri pariwisata. Wisatawan merupakan konsumen dan

produsen adalah para penyedia jasa pariwisata (Damayanti, 2015). Kebutuhan wisatawan akan barang dan jasa yang dibutuhkan selama aktivitas berwisata dapat menimbulkan aktivitas ekonomi yang memberikan pengaruh terhadap PMDN di Provinsi Bali.

Menurut Khazani (2014), salah satu indikator keberhasilan pembangunan sektor pariwisata suatu wilayah dapat digambarkan dengan seberapa banyak wisatawan yang berkunjung ke wilayah tersebut. Semakin banyak wisatawan yang berkunjung dapat dikatakan pembangunan pariwisata di wilayah tersebut telah berjalan dengan baik, begitu pula sebaliknya. Sektor pariwisata dapat memberikan pengaruh pada investasi melalui aktivitas ekonomi yang diciptakan pada industri pariwisata seperti pemenuhan kebutuhan wisatawan akan hotel, transportasi, restoran dan jasa lainnya yang dapat memberikan kontribusi terhadap investasi suatu wilayah. Selain itu industri pariwisata juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat suatu wilayah yang menjadi destinasi pariwisata.

Perkembangan sektor pariwisata di suatu daerah akan mendorong para investor dalam negeri untuk berinvestasi. Provinsi Bali diestimasikan akan menjadi daerah tujuan investor untuk berinvestasi. Hal ini karena tingkat pengembalian investasinya lebih pasti dan lebih meyakinkan (Sarwedi, 2002). Perkembangan jumlah kedatangan wisatawan mancanegara dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 3. Jumlah Kedatangan Wisatawan Mancanegara Ke Indonesia dan Provinsi Bali Periode 1995-2014

Tahun	Indonesia Total (Orang)	Bali Total (Orang)	Tahun	Indonesia Total (Orang)	Bali Total (Orang)
1995	4.310.504	1.014.085	2005	5.002.101	1.388.984
1996	5.034.472	1.138.895	2006	4.871.351	1.262.537
1997	5.184.486	1.230.316	2007	5.505.759	1.668.531
1998	4.606.416	1.187.153	2008	6.234.497	2.085.084
1999	4.600.000	1.355.799	2009	6.323.730	2.385.122
2000	5.064.217	1.412.839	2010	7.002.944	2.576.142
2001	5.153.620	1.356.774	2011	7.649.731	2.826.709
2002	5.033.400	1.285.842	2012	8.044.462	2.949.332
2003	4.467.021	995.272	2013	8.802.129	3.278.598
2004	5.321.165	1.460.420	2014	9.435.411	3.766.638

Sumber : BPS Provinsi Bali, 2015

Secara umum jumlah kedatangan wisatawan mancanegara dari tahun 1995 - 2014 lebih banyak ke Indonesia dibandingkan ke Bali karena Indonesia memiliki ruang lingkup yang lebih luas terhadap sektor pariwisata atau memiliki banyak pulau yang dijadikan obyek wisata. Kecilnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali dibandingkan ke Indonesia bukan berarti Provinsi Bali tidak diminati oleh wisatawan. Provinsi Bali menjadi tujuan daerah wisata karena memiliki obyek wisata yang beragam, baik wisata alam, wisata sejarah maupun wisata budaya. Pada Tabel 3, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara terjadi pada tahun 2014 baik di Indonesia maupun di Bali sama-sama meningkat. Provinsi Bali memberikan kontribusi besar terhadap kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia yaitu sekitar 39,55 persen.

Menurut Boediono (2001:76), unsur penentu penting yang kedua atas tingkat investasi adalah biaya investasi (suku bunga). Suku bunga merupakan landasan atau ukuran bagi layak atau tidak layaknya suatu usaha/investasi (Dewi,

2015). Suku bunga juga merupakan indikator penentuan tingkat pengembalian modal atas resiko yang ditanggung oleh pemilik modal di pasar keuangan dan pasar modal. Upaya untuk mendorong peningkatan PMDN, Pemprov Bali dengan melakukan koordinasi bersama Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia telah melakukan kebijakan intensifikasi terhadap tingkat suku bunga, yaitu dengan menurunkan *rate*-nya. Hal ini dilakukan agar investor dalam negeri berminat untuk melakukan investasi. Seorang investor akan menambah pengeluaran investasinya apabila keuntungan yang diharapkan dari investasi lebih besar dari tingkat bunga yang harus dia bayarkan untuk dana investasi tersebut yang merupakan ongkos dari penggunaan dana (*cost of capital*). Semakin rendah tingkat bunga, maka investor akan lebih terdorong untuk melakukan investasi, sebab biaya penggunaan dana juga semakin kecil (Nopirin, 1992:70).

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menarik investor agar tertarik untuk berinvestasi adalah dengan perbaikan infrastruktur, membuka lebih banyak incubator bisnis dan membangun kebijakan investasi yang lebih ramah dan tidak menggunakan prosedur yang berbelit-belit. Teori Klasik mengemukakan bahwa investasi merupakan fungsi dari suku bunga. Makin tinggi suku bunga, keinginan untuk melakukan investasi makin kecil. Hal ini terjadi karena seorang pengusaha akan menambah investasi yang ia keluarkan bilamana keuntungan yang diharapkan dari investasi tersebut masih lebih besar dibanding dengan biaya modal berupa tingkat bunga yang dibayar. Semakin rendah tingkat bunga maka pengusaha akan terdorong untuk mengadakan investasi karena biaya pemakaian dana yang lebih kecil (Sukirno, 2003).

Tabel 4. Tingkat Suku Bunga di Provinsi Bali Periode Tahun 1995-2014

Tahun	BI Rate (%)	Tahun	BI Rate (%)
1995	13,34	2005	9,16
1996	14,26	2006	11,74
1997	17,38	2007	8,04
1998	37,84	2008	9,47
1999	12,64	2009	9,65
2000	14,31	2010	6,5
2001	17,6	2011	7,1
2002	13,1	2012	5,77
2003	8,3	2013	6,48
2004	7,49	2014	7,54

Sumber: Bank Indonesia, 2015

Data tingkat suku bunga yang digunakan dalam penelitian ini adalah BI rate yang berlaku di Provinsi Bali selama Periode 1995 – 2014, seperti yang terlihat pada Tabel 4. Pada tahun 1998 terjadi tingkat suku bunga yang sangat tinggi karena pada tahun 1998 Indonesia mengalami krisis global atau krisis ekonomi yang menyebabkan tingkat inflasi tinggi sehingga pemerintah mengambil kebijakan menaikkan tingkat suku bunga hingga mencapai 37,84 persen, sementara pada masa ekonomi stabil BI Rate berkisar antara 5 sampai 8 persen.

Faktor yang mempengaruhi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Bali yang ketiga adalah pendapatan nasional. Pendapatan nasional dalam penelitian ini diproyeksikan dengan PDRB per kapita Provinsi Bali. PDRB merupakan fungsi pendapatan serta sering digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/Propinsi, terdapat kaitan yang erat dengan investasi (Mariana, 2014). Investasi merupakan fungsi dari pendapatan nasional. Meningkatnya pendapatan nasional seperti tercermin dalam PDB (untuk tingkat

nasional) dan PDRB (untuk tingkat regional) maka terdapat kecenderungan peningkatan pula dalam pembentukan modal domestik bruto. Investor akan menanamkan modalnya jika proyek yang dilaksanakan menguntungkan. Salah satu faktor yang menyebabkan sebuah investasi dapat diperkirakan mendatangkan keuntungan ialah adanya permintaan akan barang dan jasa dari masyarakat meningkat (Wahyuni, 2014). Peningkatan permintaan akan barang dan jasa merupakan salah satu dampak dari adanya peningkatan pendapatan. Meningkatnya pendapatan akan menimbulkan dampak terhadap meningkatnya permintaan barang dan jasa yang diminta. Hal ini sekaligus juga akan mengakibatkan meningkatnya jumlah proyek yang dilaksanakan.

Peningkatan pendapatan regional mencerminkan kemampuan masyarakat di dalam wilayah tersebut untuk menyerap hasil produksi (*Ability to Purchase*), sehingga akan merangsang para investor untuk meningkatkan investasinya. Tingginya pendapatan masyarakat juga mencerminkan kemampuan didalam mengembalikan modal (*Ability to Pay*). Hal tersebut akan menarik investor untuk menanamkan modalnya dengan pertimbangan modal yang ditanamkan, di masa yang akan datang bisa kembali (menguntungkan).

Pada kurun waktu dua puluh tahun, Indonesia telah mengalami imbas dari krisis moneter yang terjadi di Tahun 1998. Akibat krisis multidemensi tahun 1998 pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali mengalami penurunan yaitu sebesar 4,04 persen dari tahun sebelumnya atau sebesar Rp. 56301.559 juta rupiah daripada tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 58.671.904 juta rupiah di tahun 1997. Pemerintah berupaya melakukan beberapa kebijakan untuk mengantisipasi agar

tidak terus terjadi penurunan pada tahun berikutnya yaitu dengan pemulihan permintaan swasta, pemulihan kepercayaan publik, pembenahan sistem perbankan dan resolusi pada hutang korporat. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 0,67 persen pada tahun 1999 dan terus mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya.

Tabel 5. Perkembangan PDRB di Provinsi Bali Tahun 1995-2014 Atas Dasar Harga Konstan (Tahun Dasar 2010)

Tahun	PDRB (Juta Rp)	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Tahun	PDRB (Juta Rp)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1995	51.266.868	-	2005	71.170.629	5,56
1996	55.450.245	8,16	2006	74.928.438	5,28
1997	58.671.904	5,81	2007	79.364.202	5,92
1998	56.301.559	-4,04	2008	84.102.244	5,97
1999	56.678.780	0,67	2009	88.548.894	5,33
2000	58.401.814	3,04	2010	93.749.394	5,83
2001	60.387.476	3,43	2011	99.991.631	6,49
2002	62.223.255	3,04	2012	106.951.465	6,65
2003	64.444.626	3,57	2013	114.103.580	6,05
2004	67.421.967	4,62	2014	121.779.125	5,58

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

Kebijakan ekonomi daerah juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi investasi. Otonomi daerah dari sudut ekonomi sama dengan perdagangan bebas yang akan memberikan justifikasi ekonomi yaitu memecah konsentrasi ekonomi sehingga peredaran uang tidak hanya terjadi di Jakarta raja melainkan juga di daerah. Pengaturan otonomi daerah dapat membantu mempercepat terjadinya pemerataan kesejahteraan dengan memberikan kesempatan kepada daerah melakukan deregulasi untuk menarik investor lokal dan asing. Tidak hanya melakukan deregulasi, investasi membutuhkan stabilitas di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Kepastian di bidang hukum akan memberikan kemudahan bagi perkembangan ekonomi dan membantu para pelaku usaha dalam mengambil keputusan ekonomi.

Semakin besar tingkat kepastian maka semakin memungkinkan suatu perusahaan untuk berinvestasi, baik dalam skala tinggi, menengah, maupun kecil. Begitu pula sebaliknya, kecilnya tingkat kepastian akan mengakibatkan kurangnya minat dalam investasi (Moses *et al.*, 2013). Berlakunya kebijakan otonomi daerah di Provinsi Bali berpengaruh terhadap tingkat Penanaman Modal dalam Negeri. Hal ini karena dengan adanya kebijakan otonomi daerah regulasi menjadi lebih stabil sehingga hal ini dapat menarik minat para investor untuk berinvestasi di Provinsi Bali. Pengaturan otonomi daerah dapat membantu mempercepat terjadinya pemerataan kesejahteraan dengan memberikan kesempatan kepada daerah melakukan deregulasi untuk menarik investor lokal dan asing. Tidak hanya melakukan deregulasi, investasi membutuhkan stabilitas di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Kepastian di bidang hukum akan memberikan kemudahan bagi perkembangan ekonomi dan membantu para pelaku usaha dalam mengambil keputusan ekonomi. Semakin besar tingkat kepastian maka semakin memungkinkan suatu perusahaan untuk berinvestasi, baik dalam skala tinggi, menengah, maupun kecil. Begitu pula sebaliknya, kecilnya tingkat kepastian akan mengakibatkan kurangnya minat dalam investasi (Rahman, 2014). Hasil penelitian Muhammad (2012) menyatakan desentralisasi fiskal akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu jika ada kenaikan PDB maka pengeluaran pemerintah akan meningkat juga. Pengeluaran pemerintah yang menunjukkan kebijakan fiskal aktif yang akan mengurangi tingkat pengangguran dan akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah jangka pendek dan jangka panjang. Ketika pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut stabil maka

investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya, karena ketika keadaan pertumbuhan ekonomi stabil maka tingkat pengembalian investasi lebih pasti

Mengingat pentingnya peranan keempat faktor tersebut terhadap investasi, maka penelitian mengenai pengaruh kunjungan wisatawan, tingkat suku bunga, PDRB dan kebijakan otonomi daerah terhadap realisasi PMDN di Provinsi Bali ini penting untuk dilakukan. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk menganalisis pengaruh kunjungan wisatawan mancanegara, tingkat suku bunga, PDRB dan kebijakan otonomi daerah terhadap realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kunjungan wisatawan mancanegara, tingkat suku bunga, PDRB dan kebijakan otonomi daerah terhadap realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Bali tahun 1991-2014. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Persamaan linear berganda yakni dengan model regresi berganda, yang dinyatakan dalam bentuk umumnya adalah sebagai berikut ini (Gujarati, 2003).

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e \dots\dots\dots (1)$$

Model seperti persamaan bentuk umum diatas, dapat dibuat lebih spesifik atau merujuk pada variabel yang diteliti, yaitu sebagai berikut :

Faktor-Faktor...[Komang Sri ayu Puspita Dewi, Luh Gede Meydianawathi]

$$\text{LnPMDN} = \beta_0 + \beta_1 \text{LnWisman} + \beta_2 \text{Rate} + \beta_3 \text{LnPDRB} + \beta_4 \text{D.Otda} + e \dots (2)$$

Keterangan:

LnPMDN = Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Provinsi Bali

LnWisman = Kunjungan Wisatawan Mancanegara

Rate = Tingkat suku bunga

LnPDRB = PDRB

D.Otda = Kebijakan otonomi daerah (D=0, sebelum berlakunya kebijakan otonomi daerah, dan D=1, selama berlakunya otonomi daerah)

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien Regresi

β_0 = konstanta/ intersep

e = pengganggu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Investasi atau penanaman modal merupakan suatu penanaman modal yang diberikan oleh perseorangan atau perusahaan atau organisasi baik dalam negeri maupun luar negeri (Sucitrawati, 2014). Faktor yang dapat mempengaruhi investasi yang dijadikan bahan pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya, antara lain Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, stabilitas politik dan perekonomian, kebijakan pemerintah, dan kemudahan dalam peizinan. Investasi yang ditanamkan di Provinsi Bali ada dua yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Asing (PMA) (Prayuda, 2016). Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan.

Dilihat dari proporsi antara PMDN dan PMA di Provinsi Bali maka kontribusi yang PMDN yang lebih tinggi. PMDN mempunyai peran penting

sebagai alternatif sumber dana dalam negeri yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Dilihat dari data tersebut pada tahun 2009-2010 tingkat PMA lebih besar dari pada PMDN. Tetapi pada tahun 2011-2013 justru berbanding terbalik dimana terjadi peningkatan yang cukup drastis pada proporsi realisasi PMDN, yaitu terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Guna menunjang perekonomian daerah yang lebih baik harusnya ada keseimbangan antara PMDN dengan PMA. Oleh karena itu pemerintah provinsi telah mengupayakan beberapa kebijakan seperti memneri jaminan keamanan, menjaga stabilitas politik, dan kepastian hokum. Selain itu pemerintah juga lebih mempermudah berijinan dan berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menetapkan regulasi yang mendorong kondisi investasi, sehingga investor akan semakin tertarik untuk menanamkan modal di Provinsi Bali. PMA lebih fluktuaktif dibandingkan dengan PMDN, dimana PMDN cenderung lebih stabil dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga pada penelitian ini PMDN yang dipilih.

Dengan merujuk kepada model persamaan(2) maka persamaan regresi pengaruh kedatangan wisatawan mancanegara, suku bunga, PDRB dan Kebijakan Otonomi Daerah terhadap realisasi PMDN Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

$$\widehat{\text{LnPMDN}} = -4,086 + 1,351\text{LnWisman} - 0,113\text{Rate} + 0,119 \text{LnPDRB} + 0,044\text{D.Otda}$$

<i>Se</i>	=	(0,974)	(0,141)	(0,153)	(0,055)	(0,035)
<i>t</i>	=		(9,582)	(-1,740)	(2,139)	(2,271)
<i>Sig</i>	=		(0,000)	(0,005)	(0,049)	(0,022)
R^2	=	0,903				
<i>F</i>	=	62,684, nilai <i>F-value</i> = 0,000				

Hasil analisis uji statistik dengan menggunakan program *Eviews Versi 7* diperoleh nilai *F value* $0,000 <$ dari $\alpha = 5$ persen maka H_0 di tolak dan H_1 diterima, yang artinya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, tingkat ssuku

bunga, PDRB dan kebijakan otonomi daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Realisasi PMDN di Provinsi Bali. Hasil ini didukung oleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,903 yang memiliki arti bahwa 90,3 persen variasi dari Realisasi PMDN di Provinsi Bali dijelaskan oleh kunjungan wisatawan mancanegara, tingkat suku bunga, PDRB dan kebijakan otonomi daerah. Sedangkan 9,7 persen sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model.

Koefisien regresi variabel jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 1,351 memiliki arti bahwa apabila jumlah kunjungan wisatawan mancanegara meningkat 1 persen maka Realisasi PMDN di Provinsi Bali akan meningkat sebesar 1,351 persen dengan asumsi variabel tingkat suku bunga, PDRB dan kebijakan otonomi daerah konstan. Koefisien regresi variabel tingkat suku bunga sebesar -0,113 memiliki arti bahwa jika tingkat suku bunga naik sebesar 1 persen maka Realisasi PMDN di Provinsi Bali akan menurun sebesar 0,113 persen dengan asumsi variabel kunjungan wisatawan mancanegara, PDRB dan kebijakan otonomi daerah konstan.

Koefisien regresi variabel PDRB sebesar 0,119 memiliki arti bahwa jika PDRB periode $t-1$ meningkat sebesar 1 persen maka Realisasi PMDN periode ini di Provinsi Bali akan meningkat sebesar 0,119 persen dengan asumsi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, tingkat suku bunga dan kebijakan otonomi daerah konstan. Koefisien regresi variabel kebijakan otonomi daerah sebesar 0,044 memiliki arti ada perbedaan realisasi PMDN di Provinsi Bali sebelum dan selama berlakunya kebijakan otonomi daerah, yaitu selama berlakunya kebijakan

otonomi daerah realisasi PMDN di Provinsi Bali lebih tinggi 0,044 persen dibandingkan sebelum diberlakukannya otonomi daerah dengan asumsi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, tingkat suku bunga dan PDRB konstan.

Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Terhadap Realisasi PMDN di Provinsi Bali

Berdasarkan nilai *p-value* yang diperoleh dari hasil regresi dengan program *Eviews* nilai *p-value* sebesar $0,000 < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak atau H_1 diterima yang berarti bahwa variabel jumlah kunjungan wisatawan mancanegara secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi PMDN di Provinsi Bali.

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Menurut Khazani (2014), yang menyatakan bahwa salah satu indikator keberhasilan pembangunan sektor pariwisata suatu wilayah dapat digambarkan dengan seberapa banyak wisatawan yang berkunjung ke wilayah tersebut. Semakin banyak wisatawan yang berkunjung dapat dikatakan pembangunan pariwisata di wilayah tersebut telah berjalan dengan baik, begitu pula sebaliknya. Tidak sedikit pengaruh wisatawan terhadap kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang memiliki banyak obyek wisata, di industri pariwisata, wisatawan merupakan konsumen dan produsen adalah para penyedia jasa pariwisata. Kebutuhan wisatawan akan barang dan jasa yang dibutuhkan selama aktivitas berwisata dapat menimbulkan aktivitas ekonomi yang memberikan pengaruh terhadap investasi.

Sektor pariwisata dapat memberikan pengaruh pada investasi melalui aktivitas ekonomi yang diciptakan pada industri pariwisata seperti pemenuhan kebutuhan wisatawan akan hotel, transportasi, restoran dan jasa lainnya yang

dapat memberikan kontribusi terhadap investasi suatu wilayah. Selain itu industri pariwisata juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat suatu wilayah yang menjadi destinasi pariwisata.

Pengaruh Tingkat Suku Bunga Terhadap Realisasi PMDN di Provinsi Bali

Berdasarkan nilai *p-value* yang diperoleh dari hasil regresi dengan program *Eviews* nilai *p-value* sebesar $0,005 < \alpha = 0.05$ maka H_1 diterima atau H_0 ditolak yang berarti bahwa variabel tingkat suku bunga secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap realisasi PMDN di Provinsi Bali. Hal ini berarti bahwa ketika tingkat suku bunga mengalami peningkatan maka akan menurunkan PMDN di Provinsi Bali.

Hasil penelitian sejalan dengan teori Keynes yang dinyatakan oleh Sukirno (2010:125) bahwa suku bunga merupakan faktor utama yang mempengaruhi investasi. Jika suku bunga tinggi, maka investasi akan berkurang. Hal ini disebabkan karena kenaikan suku bunga terutama dalam hal ini suku bunga pinjaman menyebabkan biaya investasi semakin tinggi sehingga akan mempengaruhi tingkat pengembalian modal atau tingkat keuntungan yang akan diperoleh dari kegiatan investasi yang dilakukan. Demikian sebaliknya, jika suku bunga rendah akan mendorong lebih banyak investasi karena biaya investasinya rendah sehingga tingkat pengembalian modal atau harapan keuntungan dari kegiatan investasi tersebut akan tinggi”.

Tingkat bunga memiliki sifat korelasi negatif dengan pertumbuhan investasi. Bila suku bunga turun, maka investasi cenderung meningkat. Sebaliknya, bila suku bunga naik atau meningkat, maka investasi cenderung

menurun, sebab para pemilik dana lebih gemar menyimpan uangnya di bank dengan harapan memperoleh bunga yang besar. Jadi dengan sendirinya perubahan suku bunga akan mempengaruhi pertumbuhan atau penurunan investasi, selanjutnya akan mengubah tingkat pendapatan nasional.

Hasil penilitan juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningrum (2007) yang menyatakan bahwa suku bunga berpengaruh signifikan terhadap investasi. Selain itu penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian Marsela (2014), Wang (2004) dan Ojo (2014) yang menyatakan bahwa tingkat investasi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Investasi juga tergantung atau merupakan fungsi dari tingkat bunga. Semakin tinggi tingkat bunga, maka keinginan penanam modal untuk melakukan investasi juga makin kecil.

Pengaruh PDRB Terhadap Realisasi PMDN di Provinsi Bali

Berdasarkan nilai *p-value* yang diperoleh dari hasil regresi dengan program *eviews* nilai *p-value* sebesar $0,049 < \alpha = 0.05$ maka H_0 ditolak atau H_1 diterima yang berarti bahwa variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Realisasi PMDN di Provinsi Bali.

Hasil ini sesuai dengan teori Keynes dalam Sukirno (2010:130) yang menyatakan PDRB yang tinggi akan memperbesar pendapatan masyarakat, dan selanjutnya pendapatan masyarakat tersebut akan memperbesar permintaan terhadap barang-barang dan jasa. maka keuntungan perusahaan akan bertambah tinggi ini akan mendorong dilakukannya lebih banyak investasi. Dengan perkataan lain, dalam jangka panjang apabila PDRB bertambah tinggi, maka

investasi akan bertambah tinggi pula. Apabila dimisalkan ciri-ciri perkaitan diantara investasi dan pendapatan nasional adalah seperti investasi terpengaruh.

PDRB merupakan indikator perekonomian suatu wilayah. Jumlah PDRB yang tinggi menggambarkan perekonomian suatu wilayah yang tinggi. Hal tersebut mendorong kepercayaan dan merangsang para investor untuk melakukan kegiatan investasi. Hasil penelitian juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Kusumaningrum (2007) dan Vio Achfuda (2009), yang menyatakan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi.

Pengaruh Kebijakan Otonomi Daerah Terhadap Realisasi PMDN di Provinsi Bali

Berdasarkan nilai *p-value* yang diperoleh dari hasil regresi dengan program *eviews* nilai *p-value* sebesar $0,022 < \alpha = 0.05$ maka H_0 ditolak atau H_1 diterima yang berarti bahwa variabel kebijakan otonomi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi PMDN di Provinsi Bali.

Pelaksanaan Otonomi Daerah disinyalir mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi diantaranya melalui arus investasi yang masuk ke dalam suatu daerah. Dengan otonomi yang dimiliki, peran pemerintah daerah kini menjadi sama pentingnya dengan pemerintah pusat dalam peningkatan investasi (Putra, 2009). Pemerintah Daerah dituntut dapat berkreasi dalam menangani permasalahan iklim investasi di daerah masing-masing melalui berbagai kebijakan yang mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat. Pemerintah Daerah juga dituntut untuk dapat bersaing dengan Pemerintah Daerah lainnya dalam meningkatkan daya tarik investasi daerah. Hal ini disebabkan oleh motivasi pelaku usaha atau investor untuk berpindah atau melakukan investasi di daerah

lain yang memiliki daya tarik lebih tinggi. Investor akan memilih lokasi yang menawarkan peluang keuntungan lebih besar dengan risiko lebih kecil.

Salah satu tujuan dari adanya otonomi daerah adalah kemandirian suatu daerah, pertumbuhan ekonomi merupakan indikator keberhasilan suatu daerah, salahsatu pendorong pertumbuhan ekonomi adalah investasi, perkembangan investasi daerah bergantung pada banyak faktor salahsatunya adalah kebijakan investasi dari daerah tersebut dimana di era otonomi daerah sekarang lebih leluasa dalam penataan di daerah (Landiyanto, 2005). Jadi antara tiga komponen tersebut sangatlah saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Ketika suatu daerah yang memiliki kebijakan investasi yang mendorong perkembangan/pertumbuhan investasi maka perkembangan ekonomi di daerah tersebut pasti akan tumbuh pesat, dan itu akan menjadikan daerah tersebut semakin maju. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Lasaidah (2014), yang menyatakan bahwa kebijakan otonomi akan mempengaruhi tingkat investasi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan variabel jumlah kunjungan wisatawan, tingkat suku bunga, PDRB dan kebijakan otonomi daerah berpengaruh signifikan terhadap realisasi PMDN di Provinsi Bali. Secara parsial jumlah kunjungan wisatawan mancanegra ($\ln W_{isman}$), PDRB ($\ln PDRB$) dan kebijakan otonomi daerah ($D.Otda$) berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi PMDN di Provinsi Bali ($\ln PMDN$). Sementara itu, secara parsial tingkat suku

bunga (*Rate*) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap relaisasi PMDN di Provinsi Bali (LnPMDN).

Saran

Merujuk hasil penelitian, pemerintah Provinsi Bali sebaiknya melakukan usaha untuk meningkatkan kembali minat wisatawan untuk berkunjung ke Bali agar tingkat investasi mengalami peningkatan, melalui beberapa langkah, seperti pembukaan destinasi wisata baru sehingga kebutuhan sarana akomodasi akan menjadi meningkat. Adanya iklim organisasi yang baik akan meningkatkan minat penanam modal untuk berinvestasi. Pemerintah sebaiknya menjaga stabilitas suku bunga agar tidak terlalu tinggi. Hal ini dilakukan dalam upaya menarik minat para pemilik modal untuk berinvestasi.

Pemerintah daerah sebaiknya mampu menggali potensi yang dimiliki oleh daerah dan mengelola kekayaan alam yang dimiliki oleh daerah agar tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah tetap stabil dan mampu mengelola keuangan daerah sehingga mampu menerapkan sistem kemandirian keuangan daerah seperti yang tertuang dalam prinsip otonomi daerah. Apabila keadaan perekonomian di suatu daerah telah stabil maka para penanam modal akan lebih tertarik untuk berinvestasi.

REFERENSI

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali 2015. *Bali Dalam Angka*. Bali: Badan Pusat Statistik.

_____. 1970. Undang-Undang nomor 12 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Diunduh: 1 Desember 2016.

- _____. 1970. UU No. 12 tahun 1970 tentang penanaman modal asing. Diunduh: 1 Desember 2016.
- _____. 2007. Undang-Undang no 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Diunduh: 1 Desember 2016.
- BPPM. 2007. Undang-undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Diunduh: 1 Desember 2016.
- Damayanti, Ni Luh Emi. 2015. Pengaruh Kunjungan Wisatawan Asing dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Serta Pertumbuhan Ekonomi. *E-Jurnal EP Unud*. 5(7), h: 882-900
- Dewi, Putu Kartika dan Nyoman Triaryati. 2015. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Suku Bunga Dan Pajak Terhadap Investasi Asing Langsung. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 4(4): pp: 866-878.
- Dinas Pariwisata. 2009. Undang-undang RI No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan.
- Gujarati, Damodar, 2003. *Ekonometrika Dasar, Alih Bahasa*. Jakarta: Erlangga.
- Kusumaningrum, Adhitya. 2007. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi di Provinsi DKI Jakarta. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.
- Landiyanto, Erlangga Agustino. 2005. Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Surabaya. *Cures Working Paper*, No. 05/01.
- Lindblad, J. Thomas. 2015. Foreign Direct Investment In Indonesia : Fifty Years Of Discourse. *Bulletin Of Indonesian Economic Studies*, 51 (2), pp: 217-273.
- Lubis, Perdamaian. 2008. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan investasi di Indonesia*. USU e-Repository.
- Mahayana, A., dan Wayan Sukadana. 2014. Pengaruh Upah Minimum dan Investasi Pada Permintaan Tenaga Kerja Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP UNUD*, 3 (8) : 284-394.
- Mariana, Made Suyana Utama, dan Ida Bagus Purbadharmaja. 2014. Pengaruh Pertumbuhan Investasi, Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Perubahan Struktur Ekonomi Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. Vol. 3, No.6, hlm.330-344.

Faktor-Faktor...[Komang Sri ayu Puspita Dewi, Luh Gede Meydianawathi]

- Marsela, N.M.K. 2014. Pengaruh Tingkat Inflasi Suku Bunga Kredit Serta Kurs Dollar Terhadap Investasi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 3(3), h: 77-87.
- Mentari, Ni Wayan dan I Nyoman Mahaendra Yasa. 2016. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Upah Terhadap Tingkat Pengangguran melalui Jumlah Investasi di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 5 (7), h: 778-798.
- Moses., C. Olise., Anigbogu, Theresa U., Okoli., and Anyanwu, Kingsley N. 2013. Domestic Investment and Foreign Direct Investment Flows In Nigeria. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*. 13(6), pp: 01-12.
- Muhammad, Firdaus. 2012 The Dynamic of Regional Disparity in Java Island After Fiscal Decentralization. *International Journal of Economics and Management*. 6(1), pp: 150 – 166.
- Nizar, Chairul., Abubakar Hamzah dan Sofyan Syahnur. 2013. Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. 1(2), h: 1-8.
- Nopirin. 1987. *Ekonomi Moneter. Buku 2. Edisi I*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Ojo, A.S. 2014. Interest Rate Policy and Private Domestic Investment in Nigeria. *The Business and Management Review*, Vol. 5 (1), h: 250-254.
- Prayuda, M., dan Urmila Dewi. 2016. Pengaruh Inflasi dan Investasi Yang Berpengaruh Terhadap Pengangguran Di Provinsi Bali tahun 1994-2013. *Jurnal EP Unud*, 5 (1) :69-95.
- Putra, Vio Achfuda. 2010. Analisis Pengaruh Suku Bunga Kredit, PDB, Inflasi dan Tingkat Teknologi terhadap PMDN di Indonesia Periode 1986-2008. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Sarwedi. 2002. Investasi Dalam Negeri Langsung di Indonesia dan Faktor yang Mempengaruhinya. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 2(1), h:1-23.
- Sucitrawati, P., dan Sudarsana Arka. 2014. Pengaru Inflasi, Investasi Dan Tingkat Upah Terhadap Tingkat Pengangguran Di Bali. *E-Jurnal EP UNUD*. 2(1), h: 1-62.
- Sukirno, Sadono. 2003. *Makroekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tanuwidjaya, Gunawan dan Joyce Martha Widjaya. 2013. Revitalisasi Kota dan Kabupaten Yang Lebih Berkelanjutan: Kerangka Kerjasama dan Perencanaan Partisipatif di Bangkalan Madura. *Jurnal Pembangunan Daerah*. 1(1), h: 59-76.

- Tendelilin, Eduardus. 2010. *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi*. Edisi pertama. Yogyakarta : Kanisius.
- Udayantini, Kadek Dewi., I Wayan Bagia dan I Wayan Suwendra. 2014. Pengaruh Jumlah Wisatawan Dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Pendapatan Sektor Pariwisata di Kabupaten Buleleng Periode 2010-2013. *e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha*. 3(1), 1-10.
- Vio Achfuda, Putra. 2010. Analisis Pengaruh Suku Bunga Kredit, PDB, Inflasi, dan Tingkat Teknologi Terhadap PMDN di Indonesia Periode 1986 – 2008. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Wahyuni, Putri Ayu. 2014. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. Vol 3 No 8.
- Wang, B. 2004. Effects of Government Expenditure on Private Investment: Canadian Empirical Evidence. *Empirical Economics*, h: 493-504.